

## ABSTRAK

*Ketimpangan wilayah di Kabupaten Blora mengisyaratkan proses pembangunan yang kurang baik, kebergantungan masyarakat pada sektor primer mengindikasikan wilayah ini sebagai daerah yang relatif tertinggal. DPRD sebagai aktor politik memiliki pengaruh dalam perencanaan pembangunan dan diduga kuat menggunakan kepentingan politiknya untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan. Selain itu, DPRD juga memiliki alat pembangunan melalui penjangkaran aspirasi dan dana aspirasi. Keberadaan dana aspirasi banyak dianggap sebagai perluasan hak budget dan rawan penyalahgunaan, meskipun sebenarnya dapat menjadi solusi bagi percepatan penyerapan anggaran untuk pembangunan. Hal ini yang menjadi pertimbangan bagi penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan kecenderungan proses-proses politik yang dilaksanakan oleh anggota dewan untuk menjangkaran aspirasi dan menyalurkan dana aspirasi dalam rangka menciptakan pembangunan wilayah.*

*Penelitian ini ditujukan untuk menilai dampak dan efektivitas penjangkaran aspirasi dan penyaluran dana aspirasi terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Blora. Kajian dilaksanakan dengan dasar analisis kualitatif namun mengintegrasikan beberapa analisis kuantitatif seperti tipologi klassen dan shiftshare ekonomi wilayah. Alat-alat analisis yang digunakan diantaranya merupakan analisis spasial dan analisis pemetaan stakeholder untuk mengkaji pola-pola atau kecenderungan pelaksanaan penjangkaran aspirasi dan penyaluran dana aspirasi. Selanjutnya kajian efektivitas dinilai untuk mengetahui kontribusi keberadaan alat-alat pembangunan dewan ini terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Blora melalui pendekatan perkembangan pembangunan wilayah menurut perubahan IDM tahun 2019 & 2023 serta data pengetahuan dan penilaian masyarakat atas kinerja DPRD di Kabupaten Blora.*

*Hasil temuan mengungkapkan bahwa proses penjangkaran aspirasi dan penyaluran dana aspirasi yang dilakukan oleh enam narasumber di lima daerah pemilihan secara umum dilaksanakan atas kepentingan konstituen, hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi prioritas penyaluran dana aspirasi terhadap sasaran-sasaran pembangunan di masing-masing wilayah. Beberapa mekanisme yang dijalankan oleh sebagian narasumber didasarkan atas kepentingan politis untuk menambah elektabilitas serta beberapa dipengaruhi oleh ideologi partai seperti yang terjadi pada narasumber dari partai PKB. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa orientasi pembangunan wilayah oleh DPRD di Kabupaten Blora dilaksanakan atas kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk penyelesaian masalah, hal ini juga dikuatkan bahwa sasaran-sasaran pembangunan juga sesuai dengan karakteristik dan dominasi aktivitas masyarakat di tiap dapil. Analisis efektivitas menunjukkan bahwa keberadaan dana aspirasi memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan wilayah berdasarkan perubahan status IDM di masing-masing wilayah, meskipun porsi anggaran dana aspirasi dapat dikatakan kecil, namun kontribusinya terhadap penyelesaian isu di tingkat mikro membuat dana ini dapat membantu mempercepat proses pemerataan pembangunan wilayah. Keberadaan pokir atau aspirasi masyarakat sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap pembangunan wilayah, bahwa pokir merupakan bagian dari pertimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam setiap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).*

*Kata Kunci : pembangunan wilayah, penjangkaran aspirasi, pokir, dana aspirasi, DPRD Kabupaten Blora*